

Bab 7.

Sumber-Sumber Dan Nilai Dalam Perilaku Etika

Pembahasan Materi:

Sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika:

- Agama
- Filosofi
- Budaya
- Hukum
- Politik

7.1. Agama

Islam menganggap etika sebagai cabang dari Iman, dan ini muncul dari pandangan dunia islam sebagai cara hidup manusia. Istilah etika yang paling dekat dalam konteks agama islam disebut akhlak. Akhlak adalah seperangkat nilai moral Islam yang telah ditentukan secara mendasar dalam Quran dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW selama hidupnya (Wan Hamat et al, 2013). Pada prinsipnya, ada dua (2) jenis akhlak, yaitu akhlak baik atau akhlak buruk. Islam menekankan pentingnya mempraktikkan akhlak yang baik seperti yang sudah dicontohkan oleh utusan-utusan-Nya (Shaharuddin, 2005). Nabi Muhammad berkata: “Aku diutus dengan tujuan menyempurnakan kualitas akhlak manusia" (Imam Malik).

Etika bisnis menurut ajaran Islam digali langsung dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dalam ajaran Islam, etika bisnis dalam Islam menekankan pada empat hal, yaitu: Kesatuan (*unity*), Keseimbangan (*equilibrium*), Kebebasan (*free will*), dan tanggungjawab (*responsibility*) (Mubyarto, 2002). Ajaran Islam memandang bahwa manusia sebagai wakil (*khalifah*) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik karena semua kekayaan yang ada di bumi adalah milik Allah SWT semata, dan manusia merupakan perwakilannya di bumi.

Dikatakan bahwa dalam ajaran filsafat Islam, etika ini yang mempengaruhi ekonomi dan bukan sebaliknya (Naqvi, 1981) dan ekonomi Islam dicirikan sebagai ekonomi yang etis. Islam tidak mendukung keserakahan terhadap harta, kekayaan, pencapaian kekuasaan dan kedudukan yang tinggi. Islam mendorong

manusia untuk mencapai kemakmuran materi dalam batas yang benar, karena tanpa kesejahteraan maka kehidupan menjadi kurang lengkap.

Lingkungan yang etis membuka jalan dan memberi landasan pada peningkatan kinerja. Selain itu, lingkungan etis juga memberikan dukungan penting untuk memaksimalkan nilai kepemilikan seseorang (Sternberg, 2000). Negara-negara Islam memiliki tingkat kemakmuran yang beragam. Selama bertahun-tahun, para ekonom telah berusaha untuk memahami mengapa negara-negara Islam tidak cepat dimodernisasi dalam lima puluh tahun terakhir, mengingat bahwa doktrin-doktrin Islam tidak bertentangan dengan kemajuan ekonomi (Wang & Young, 2011).

Etika bisnis Islam, menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran dan keadilan, sedangkan antara pemilik perusahaan dan karyawan berkembang semangat kekeluargaan. Prinsip transparansi dalam model kekeluargaan memberikan keleluasaan bagi pemilik perusahaan untuk setiap tindakan yang diambil seperti: dapat mempertimbangkan untuk menurunkan gaji karyawan apabila perusahaan sedang mengalami kerugian, dan juga perusahaan dapat memberikan bonus kepada karyawan apabila perusahaan mengalami peningkatan keuntungan.

Perspektif Islam meyakini bahwa kegiatan ekonomi dan perilaku ekonomi seharusnya benar-benar berada di bawah pengaruh kepercayaan dan nilai agama. Umumnya, semua program dan perilaku ekonomi harus dilakukan bersamaan dengan tujuan keagamaan (Hakimi, Al-Hakimi, & Al-Hakimi, 1990).

Max Weber mengatakan dalam bukunya *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* (1904) menjadi awal keyakinan adanya hubungan erat antara ajaran agama dan etika kerja atau antara penerapan ajaran agama dengan pembangunan ekonomi. Etika yang bersumber dari ajaran agama mengandung prinsip yang berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran, sikap dan perilaku yang di “kasih” Tuhan (Hanskung, 2005).

Pada dasarnya ada persamaan dalam tiap-tiap agama menyangkut hubungannya dengan dasar dalam ber etika.

- 1) Keadilan: kejujuran untuk mempergunakan kekuatan untuk menjaga nilai-nilai kebenaran
- 2) Saling menghormati: cinta dan perhatian terhadap orang lain.
- 3) Pelayanan: manusia hanya “pelayan”, “pengawas” sumber-sumber alam.
- 4) Kejujuran: kejujuran dan sikap dapat dipercaya dalam semua hubungan manusia, dan integritas yang kuat.

Quddus, Bailey, dan White (2009) menyatakan bahwa standar moral dan persepsi etis orang berasal dari konsep latar belakang dan nilai agama mereka. Oleh karena itu, apa yang orang pahami dari istilah "etika" dan bagaimana penerapannya dalam rutinitas dan kehidupan bisnis mereka mewakili pemikiran, moral dan kepercayaan religius mereka.

Etika sebagai ajaran baik-buruk, benar-salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi terutama bersumber dari ajaran-ajaran agama. Itu sebabnya banyak ajaran dan paham dalam ekonomi barat menunjuk pada kitab Injil (Bible), ekonomi Yahudi pada kitab Taurat, dan ekonomi Islam termuat dalam Al-Qur“an lebih dari seperlima ayat-ayat yang ada didalamnya.

7.2. Filosofi

Filosofi juga menjadi acuan-acuan yang berkembang dalam proses pengambilan keputusan yang bersumber dari nilai-nilai etika. Ajaran-ajaran ini berkembang dari hasil pemikiran manusia dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan ajaran filsosfi terhadap kemunculan etika bisnis:

1. Socrates (470 -399 SM)

Socrates mempercayai bahwa manusia ada untuk satu tujuan, dan bahwa salah dan benar memainkan peranan yang penting dalam mendefinisikan hubungan seseorang dengan lingkungan dan sesamanya. Socrates percaya bahwa kebaikan berasal dari pengetahuan terhadap diri dan pada dasarnya manusia itu jujur. Munculnya sikap jahat merupakan sebuah bentuk salah pengarahan terhadap diri sesorang. Dia juga memperkenalkan ide-ide hukum moral, bahwa hukum moral lebih tinggi kedudukan nya dibanding hukum manusia.

2. Plato (428-348 SM)

Republik (dalam bahasa Yunani *Politeia* atau “negeri”) merupakan suatu bentuk uraian pandangan Plato terhadap keadaan “ideal” dari sebuah negara. Dalam bukunya, Plato menjelaskan bahwa pemerintahan yang ideal mengalami pergantian dalam lima tahun sekali, dimana sistem ini banyak diterapkan oleh kehidupan bernegara saat sekarang ini. Plato berpendapat bahwa keadaan ideal muncul sebagai hasil dari pemikiran yang bersifat intelektual dengan mendasarkan nilai-nilai kebajikan dan konsep kebenaran.

3. Aristoteles

Etika menurut Aristoteles adalah perilaku jiwa yang baik yang menuntun kepada kebahagiaan dan kebenaran. Keterbatasan pengetahuan tentang jiwa manusia tidak menjadi sebuah hambatan untuk mendalami konsep etika. Filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles berpendapat bahwa jiwa manusia menginginkan sebuah kebahagiaan dan jiwa bahagia lahir dari perbuatan yang bersumber dari kebajikan moral. Hal ini yang menjadi dasar perkembangan pola pemikiran barat dan keagamaan lain pada umumnya.

4. Nabi Muhammad SAW

Perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai salah satu sumber tauladan dalam perilaku etika bisnis. Sebelum menjadi rasul, Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang dimulai ketika beliau berusia 12 tahun. Dalam berdagang, beliau menerapkan prinsip kejujuran sehingga beliau mendapat gelar *Al-Amien*. Ada empat pilar etika manajemen bisnis menurut Islam seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. yaitu:

- a) **Tauhid**, yang berarti memandang bahwa segala aset dari transaksi adalah milik Allah. Dalam hal ini manusia hanya bertindak sebagai pelaksana amanat dari Yang Maha Kuasa.
- b) **Adil**, artinya segala keputusan menyangkut transaksi dengan lawan bisnis atau kesepakatan kerja harus dilandasi dengan akad saling setuju dengan sistem profit dan loss sharing.

- c) **Kehendak bebas**, umat islam diberi kebebasan untuk berkreativitas dalam transaksi bisnis selama tetap berada dalam batasan-batasan yang telah diatur dalam ekonomi islam.
- d) **Pertanggungjawaban**, semua bentuk keputusan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

7.3. Budaya

Budaya merupakan sebuah warisan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dimana nilai-nilai atau aturan yang telah ada sebelumnya menjadi acuan dan dilestarikan sesuai dengan ajaran-ajaran pendahulunya dan kemudian akan menjadi sebuah standar dalam berperilaku sehari-hari. Sebagaimana ciri khas bangsa Asia, ciri khas yang paling dominan adalah budaya, kekeluargaan, kerjasama dan hubungan kekeluargaan yang erat. Hal ini juga berlaku sebagai budaya di Indonesia. Semangat gotong royong diyakini menjadi salah satu akar budaya di Indonesia. Diperkuat dengan semboyan kenegaraan kita Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda namun tetap satu.

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan ekonomi, nilai-nilai gotong royong sudah banyak mengalami pergeseran. Nilai individualistis dan mengutamakan kepentingan pribadi lebih menonjol dan menjadi mayoritas perilaku bangsa kita saat ini.

Pengaruh Budaya Perusahaan Terhadap Nilai-Nilai Etika

Budaya perusahaan adalah suatu kumpulan nilai-nilai, norma-norma, ritual dan pola tingkah laku yang menjadi karakteristik suatu perusahaan. Budaya perusahaan akan memiliki dimensi etika yang didorong tidak hanya oleh kebijakan-kebijakan formal perusahaan, tetapi juga karena kebiasaan sehari-hari yang berkembang dalam organisasi perusahaan tersebut, sehingga kebiasaan tersebut dipercaya menjadi sebuah acuan perilaku beretika.

Banyak kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan oleh perusahaan menjadi nilai-nilai etika tersendiri yang lama kelamaan menjadi kebiasaan baru. Bahkan nilai etika tersebut menjadi sebuah cara jitu untuk melayani para *stakeholders*.

7.4. Hukum

Hukum merupakan perangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hukum menentukan ekspektasi-ekspektasi etika yang diharapkan dalam komunitas dan mencoba mengatur serta mendorong pada perbaikan-perbaikan masalah yang dipandang buruk atau tidak baik dalam komunitas.

Indonesia menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum eropa kontinental yang dibawa oleh Belanda ketika menjajah Indonesia, sedangkan di beberapa daerah juga ada penerapan hukum yang berdasarkan hukum adat dan hukum agama seperti di daerah Aceh. Pada umumnya pebisnis lebih menerapkan hukum sebagai cermin etika mereka, hal ini disebabkan oleh kejelasan mengenai aturanaturan serta hukuman yang diberikan oleh perangkat hukum memiliki kedudukan yang lebih konkrit ketimbang hukum yang hanya bersifat moral.

7.5. Politik

Pengertian politik berasal dari kosa kata "*politics*" yang memiliki makna bermacam-macam *kegiatan dalam suatu sistem politik atau "negara" yang menyangkut proses tujuan penentuan-penentuan tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan atau "decisionsmaking"* mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu yang menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang dipilih tersebut.

Untuk pelaksanaan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan **kebijaksanaan-kebijaksanaan umum atau *public policies***, yang menyangkut **pengaturan dan pembagian** atau *distributions* dari sumber-sumber yang ada. Untuk melakukan kebijakan-kebijaksanaan itu diperlukan suatu kekuasaan (*power*), dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat *persuasi*, dan jika perlu dilakukan suatu pemaksaan (*coercion*). Tanpa adanya suatu paksaan kebijakan ini hanya merupakan

perumusan keinginan belaka (*statement of intents*) yang tidak akan pernah terwujud. Secara operasional bidang politik menyangkut **konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decisions making*), kebijaksanaan (*policy*), pembagian (*distributions*) serta alokasi (*allocation*).**

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*privat goals*). Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, lembaga masyarakat maupun perseorangan. Dalam hubungan dengan etika politik pengertian politik harus dipahami dalam pengertian yang luas yaitu menyangkut seluruh unsur yang membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut masyarakat negara.

Etika politik merupakan sebuah *cabang dalam ilmu etika yang membahas hakikat manusia sebagai makhluk yang berpolitik dan dasar-dasar norma yang dipakai dalam kegiatan politik*. Etika politik sangat penting karena mempertanyakan hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan mempertanyakan atas dasar apa sebuah norma digunakan untuk mengontrol perilaku politik. Etika politik menelusuri batas-batas ilmu politik, kajian ideologi, asas-asas dalam ilmu hukum, peraturan-peraturan ketatanegaraan, asumsi-asumsi, dan postulate - postulat tentang masyarakat dan kondisi psikologis manusia sampai ke titik terdalam dari manusia melalui pengamatan terhadap perilaku, sikap, keputusan, aksi, dan kebijakan politik. Etika politik tidak menerima begitu saja sebuah norma yang melegitimasi kebijakan-kebijakan yang melanggar konsep nilai intersubjektif (dan sekaligus nilai objektif juga) hasil kesepakatan awal. Jadi, tugas utama etika politik sebagai metode kritis adalah memeriksa legitimasi ideologi yang dipakai oleh kekuasaan dalam menjalankan wewenangnya. Namun demikian, bukan berarti bahwa etika politik hanya dapat digunakan sebagai alat kritik. Etika politik harus pula dikritisi. Oleh karena itu, etika politik harus terbuka terhadap kritik dan ilmu-ilmu terapan.

Etika politik bukan sebuah norma, juga bukan sebuah aliran filsafat atau ideologi, sehingga tidak dapat dijadikan sebuah pedoman siap pakai dalam

pengambilan kebijakan atau tindakan politis. Etika politik tidak dapat mengontrol seorang politikus dalam bertindak atau mengambil keputusan, baik keputusan individu, organisasi, atau kelompok. Namun, etika politik dapat dijadikan rambu-rambu yang membantu politikus dalam mengambil keputusan.

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara rasional objektif dan argumentative. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif.

Hukum dan kekuasaan Negara merupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan Negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia (makhluk individu dan sosial). Pokok permasalahan etika politik adalah legitimasi etis kekuasaan. Sehingga penguasa memiliki kekuasaan dan masyarakat berhak untuk menuntut pertanggungjawaban. *Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari segi norma-norma moral.* Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa setiap tindakan Negara baik legislatif maupun eksekutif dapat dipertanyakan dari segi norma-norma moral. Moralitas kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat.